



**ANALISIS PERAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENGENTASAN  
KEMISKINAN DI MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT**

**(Studi Kasus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat)**

T. Argya Amanda, Augustin Rina Herawati, Teuku Afrizal

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (Aceh Party) West Aceh Regency is one of the large organizations that is very influential and plays a strategic role in West Aceh Regency, so this makes the DPW-PA West Aceh Regency play a role in poverty alleviation and improving people's welfare in West Aceh Regency. The high level of poverty percentage in West Aceh Regency in 2021 is 18.81% so that it is in seventh position out of 23 Regencies/Cities in Aceh Province. This is influenced by several factors, so that the poverty rate that occurs in West Aceh Regency increases by 0.47% in 2021. This study aims to describe and determine the role and supporting and inhibiting factors of the West Aceh Regency DPW-PA in poverty alleviation in West Aceh Regency. This study uses qualitative methods, data collection techniques by interviews and observation and documentation, data sources using primary and secondary data. The results showed that the West Aceh Regency DPW-PA played a very good role as a coordinator, facilitator, accelerator, policy creator and implementer in poverty alleviation in West Aceh Regency. However, there were several factors inhibiting the role, namely internal problems and gaps between members.*

**Keywords:** *Role, political party, Poverty Alleviation*

**ANALISIS PERAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENGENTASAN  
KEMISKINAN DI MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT**

**(Studi Kasus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat)**

T. Argya Amanda, Augustin Rina Herawati, Teuku Afrizal

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (Aceh Party) West Aceh Regency is one of the large organizations that is very influential and plays a strategic role in West Aceh Regency, so this makes the DPW-PA West Aceh Regency play a role in poverty alleviation and improving people's welfare in West Aceh Regency. The high level of poverty percentage in West Aceh Regency in 2021 is 18.81% so that it is in seventh position out of 23 Regencies/Cities in Aceh Province. This is influenced by several factors, so that the poverty rate that occurs in West Aceh Regency increases by 0.47% in 2021. This study aims to describe and determine the role and supporting and inhibiting factors of the West Aceh Regency DPW-PA in poverty alleviation in West Aceh Regency. This study uses qualitative methods, data collection techniques by interviews and observation and documentation, data sources using primary and secondary data. The results showed that the West Aceh Regency DPW-PA played a very good role as a coordinator, facilitator, accelerator, policy creator and implementer in poverty alleviation in West Aceh Regency. However, there were several factors inhibiting the role, namely internal problems and gaps between members.*

**Keywords:** *Role, political party, Poverty Alleviation*

## PENDAHULUAN

Organisasi sebagai bidang ilmu sosial memegang peranan penting terhadap kehidupan manusia. Keorganisasian diperlukan pada setiap aspek kehidupan manusia. Organisasi dilihat dari perspektif perilaku sementara teori keorganisasian dilihat dari segi sekelompok individu yang saling bekerja sama agar mencapai tujuan bersama. Selain itu organisasi merupakan suatu wadah dimana tempat individu berkumpul, bekerjasama dan memiliki tugas secara sistematis dan rasional mencapai tujuan yang ditetapkan. (Arie, 2018).

Partai Politik adalah organisasi sebagai pondasi demokrasi karena partai politik menjalankan fungsi penting sebagai perantara antara pemerintahan dan rakyat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pada Pasal 11 yaitu membahas mengenai fungsi dari partai politik sebagai sarana dalam perannya sebagai partai politik. Partai Politik sepatutnya melaksanakan fungsinya dengan baik dan sesuai arah tujuan sehingga bisa membentuk negara demokratis. Fungsi partai politik sangat krusial, tak jarang keberadaannya dan kinerjanya dijadikan suatu ukuran absolut bagaimana demokrasi berkembang disuatu Negara. Walaupun partai politik bukan pelaksana dalam pemerintahan, tetapi

keberadaannya menjadi pengaruh arah dan bagaimana jalan pemerintah.

Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dinyatakan pula dalam Pasal 75 (1) "Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal." Eksistensi Partai Politik Lokal adalah penambah sarana dalam penyampaian aspirasi politik rakyat. Khususnya Aceh, keberadaan Partai Politik Lokal menaruh asa dihidupnya pada demokrasi di Provinsi Aceh. Saat ini rakyat Aceh bertambah fleksibel terhadap menerangkan perilaku politik melalui Parpol Lokal yang dibentuk di Aceh. Berkembangnya demokrasi di Indonesia salah satunya dilihat dari kehadiran Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh.

Kehadiran Partai Aceh sebagai partai lokal di Aceh, Tahun 2009 merupakan awal Partai Aceh mengikuti kontestasi pada Pemilu. Keikutsertaan Partai lokal merupakan sejarah baru terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemenangan Partai Aceh (PA) pada Pemilu 2009 mengisyaratkan bahwasannya masyarakat Aceh memiliki harapan besar kepada Partai Aceh. Keunggulan Partai Aceh di Provinsi Aceh dengan meraup 1,007,173 suara (43,9%).

Sesuai dengan arah tujuan Partai Aceh yang tertulis dalam AD/ART Partai

Aceh dalam Pasal 4 Partai Aceh memiliki 4 tujuan utama, ayat 3 tertulis “Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur, dan merata baik secara materiil dan spirituil bagi seluruh rakyat Aceh”. Maka dari itu mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh merupakan amanah dan tanggungjawab bagi Partai Aceh di seluruh Kabupaten di Provinsi Aceh. (Ad/Art PA, 2013)

Aktivitas Partai Aceh bukan hanya saat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Melainkan Partai Aceh sebagai stakeholder yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam melakukan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat umum. Tugas dan kerja Partai Aceh juga harus diimbangi dengan peningkatan perekonomian masyarakat dan penyelesaian pengentasan kemiskinan. Faktor politik bisa berpengaruh melalui berbagai aspek yang menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti investasi sumber daya manusia dan infrastruktur, perbaikan institusi politik dan hukum

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang belum

terpecahkan, khususnya di negara Indonesia. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor yang sering dilupakan, seperti kurangnya kualifikasi atau pembangunan manusia. Tindakan yang membuat seseorang atau individu tidak mampu bersaing dalam angkatan kerja, berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran, kemudian ketidakmampuan mengelola sumber daya alam yang tersedia, membatasi kesempatan kerja dan lain sebagainya (Rahmah, 2016).

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Barat merupakan angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu yaitu pada tahun 2016-2021 Jumlah penduduk dan di Kabupaten Aceh barat relatif naik dan turun setiap tahunnya. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan persentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi,

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat tahun**  
**2016-2021**

No	Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
1	2016	197,921	20,38
2	2017	201,682	20,28
3	2018	205,971	19,31
4	2019	210,113	18,79
5	2020	198,736	18,34
6	2021	200,579	18,81

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Barat*

Menurut data RPJM Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2022, tingginya persentase kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat diakibatkan oleh beberapa hal seperti: (I). Pertumbuhan dan peningkatan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat condong stasioner karena pengaruh akibat global laju pertumbuhan perekonomian tidak optimal dan merata; (II). Sempitnya ruang usaha dan meningkatnya angka pengangguran, sebab tidak tercapainya Kualifikasi atau keterampilan calon pekerja; (III). Rendahnya kualitas pendidikan yang bermutu; (IV). Rendahnya tingkat kesehatan yang baik kepada masyarakat; (V). Terbatas dan terhambatnya infrastruktur sanitasi dan air minum yang memadai; dan (VI). Fasilitas penunjang pertanian yang kurang memadai serta penanganan panen dan pascapanen yang kurang baik.

Berdasarkan uraian diatas ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih jauh tentang bagaimana peran Partai Politik lokal yang berfokus pada Partai Aceh dalam pengentasan kemiskinan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan menarik untuk diteliti, maka penulis menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Peran Partai Politik Lokal dalam Pengentasan Kemiskinan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat (studi kasus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat) ”, sehingga dapat diterapkan sebagai dasar dan landasan kebijakan pemerintah, swasta ataupun kepartaian politik dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Barat dalam Pengentasan kemiskinan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Barat dalam pengentasan kemiskinan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat ?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Barat dalam Pengentasan kemiskinan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Barat dalam pengentasan kemiskinan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

## **KERANGKA TEORI**

### **Peran**

Berdasarkan perannya, menurut (Nugroho et al., 2014:16) Stakeholder dalam suatu rencana pembangunan dikategorikan menjadi lima yaitu :

- a. *Policy creator*, bertugas membuat kebijakan atau melakukan pengambilan suatu keputusan.
- b. Koordinator, memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pemangku kepentingan lain yang ikut berpartisipasi.
- c. Implementator, melaksanakan rencana yang sudah dibuat yang didalamnya termasuk kelompok sasaran.
- d. Fasilitator, memiliki tugas untuk membantu memfasilitasi, mempermudah dan mencukupi apa yang dibutuhkan agar sesuai jalan rencana.
- e. Akselerator, memiliki tugas untuk membantu mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan program dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Teori peran (Role Theory) merupakan suatu teori yang memiliki keterkaitan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran merupakan awal dari sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara

tertentu. Actor memposisikan diri dalam teater yang dianalogikan posisi seseorang dalam masyarakat dan berada di posisi tersebut diharapkan menerapkan perilaku tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan orang lain (Sarwono, 2002).

Faktor Pendukung dan penghambat dalam menjalankan suatu peran baik itu peran dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi pasti akan terjadi. Menurut Horton dan Hunt dalam (Ekarishanti & Kismartini, 2019:5) Faktor Pendukung peran antara lain :

- a. Kompetensi, keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan perannya membutuhkan kompetensi dari individu yang menjadi anggota organisasi guna menjalankan suatu kegiatan dalam bentuk perilaku yang berkaitan.
- b. Sosialisasi, merupakan proses dalam mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan serta berkaitan dengan perubahan perilaku atau sikap di masyarakat setelah dilakukan sosialisasi.
- c. Perilaku peran, perilaku yang diharapkan dari seorang dalam status dan kedudukan tertentu sehingga secara tidak langsung perilaku peran yaitu perilaku seseorang atau

kelompok terhadap suatu organisasi yang searah dengan perannya.

Adapun faktor penghambat peran yang mengakibatkan kurang maksimalnya keberjalanan atau pelaksanaan peran yaitu sebagai berikut :

- a. *Role conflict*, konflik yang berlangsung antara satu peran dengan peran lainnya dan konflik yang terjadi dalam satu peranan merupakan konflik yang sering terjadi.
- b. *Role transition*, adanya perubahan dari satu peran terhadap peran lainnya maka harus diimbangi dengan kesiapan berupa pengalaman dan adaptasi karena perubahan peran seringkali tidak sama dengan peran sebelumnya.
- c. *Role distance*, kesenjangan peran biasanya terjadi jika seseorang atau kelompok merasakan ketidaksesuaian dalam menjalankan perannya dan pada akhirnya menimbulkan perasaan terbebani.

### **Partai Politik**

Neuman (dalam Maran, 2005: 85) menyatakan Partai politik merupakan organisasi yang menjembatani para pelaku politik aktif kepada masyarakat yang mengontrol kekuasaan pemerintah dengan bersaing dengan kelompok lain yang

mempunyai pemikiran yang berbeda dalam aspek memperoleh dukungan masyarakat.

Tujuan partai politik pada dasarnya ialah keadaan yang dikehendaki dimana senantiasa dikejar untuk diwujudkan di masa yang akan datang. Partai politik mengupayakan tujuan sedemikian rupa agar terwujudnya pola aspiratif, agar dapat dicapai dan berorientasi ke masa depan untuk memberikan harapan, mempunyai daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang dukungan yang kuat (Oka Mahendra, 2004: 99)

### **Kemiskinan**

Menurut Todaro (2003: 219). Kemiskinan merupakan permasalahan yang rumit, tidak saja sekedar perkara kekurangan ekonomi namun juga mencakup hak-hak dasar dan juga kesenjangan sosial, budaya, politik juga ideologi. Inti dari ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, masalah sosial yang berkaitan dengan keadilan, dengan kata lain adanya perbedaan antara seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Dikemukakan oleh Soegijoko (1997:148). Langkah-langkah untuk mengentaskan kemiskinan harus diintegrasikan ke dalam tiga aspek utama, Keutamaan tidak langsung bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjalankan

kelangsungan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Keutamaan langsung ditujukan pada masyarakat yang berpendapatan rendah. Keutamaan khusus masyarakat miskin berusaha menyiapkan diri sendiri dan pejabat yang bertanggung jawab langsung atas kelancaran program.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deksriptif kualitatif. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Barat. Situs penelitian ini adalah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Barat. Subjek penelitian yaitu teknik *purposive sampling* digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel yaitu DPW-PA Kabupaten Aceh Barat, Dinas Sosial Kabupaten Aceh barat, Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat, Akademisi dan Tokoh Masyarakat. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data nya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kualitas data ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten**



## **Aceh Barat dalam Pengentasan Kemiskinan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat**

Terdapat beberapa peranan DPW-PA Kabupaten Aceh Barat, dimana peranan tersebut didasari oleh teori peran menurut (Nugroho et al., 2014) yaitu koordinator, fasilitator, akselerator, *policy creator*, dan implementator. Hal lebih lanjut terkait dengan peranan DPW-PA Kabupaten Aceh Barat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat akan dibahas dibawah ini.

### **1. Peran Sebagai Koordinator**

Dalam siklus peranan sebagai koordinator DPW PA kabupaten Aceh Barat menjalin kolaborasi dan kerjasama bersama Pemerintah, Stakeholder dan pihak terkait dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat

Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada program pengentasan kemiskinan yaitu Pemerintah Kabupaten, Dinsos, Kesbangpol dan stakeholder lain dengan tujuan agar program pengentasan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik dan mampu memberikan dampak atau manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hasil ini sejalan dengan temuan Meilizar, & Hasan (2018) bahwa upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pengentasan

permasalahan kemiskinan. Pembentukan tim koordinasi penyelesaian kemiskinan, yang salah satunya berkoordinasi dengan partai politik lokal.

DPW PA Kabupaten Aceh Barat mendapat dukungan secara langsung dari instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat dan Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat dalam menjalin kolaborasi dan kerjasama perihal pengentasan dan peningkatan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat. Pihak koordinator pada saat kerjasama dan kolaborasi perihal program pengentasan kemiskinan antara Pemerintah dan DPW-PA Kabupaten Aceh Barat tetap berada pada pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Selain itu peranan sebagai koordinator DPW PA Kabupaten Aceh Barat juga menyerap aspirasi dan laporan masyarakat yang nantinya disampaikan dan dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait untuk merancang suatu program-program yang direncanakan agar pihak lain siap mendukung atau berkolaborasi bersama untuk kepentingan masyarakat kabupaten Aceh Barat. Dilakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam menjalin kolaborasi untuk membahas permasalahan yang terjadi dengan dilakukan rapat bersama

### **2. Peran Sebagai Fasilitator**

DPW PA Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam program pengentasan kemiskinan khususnya untuk menginisiasi program tersebut dikarenakan adanya pertimbangan kondisi yang dikeluhkan masyarakat sehingga wujud nyata peran DPW PA adalah memfasilitasi harapan masyarakat untuk diteruskan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap laporan, pengaduan maupun saran tentang program pengentasan kemiskinan menjadi dasar bagi DPW PA untuk menginisiasi.

Tahapan yang dilakukan oleh DPW PA Kabupaten Aceh Barat sebagai peranan fasilitator sebelum melaksanakan atau merancang suatu program yaitu merespon aspirasi dari masyarakat dengan melakukan pemeriksaan langsung kelapangan dan melakukan pengumpulan data-data terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Perwakilan rakyat di DPRK Kabupaten Aceh Barat berasal dari berbagai Partai Politik, salah satunya Partai Aceh yang dalam hal ini DPW PA Kabupaten Aceh Barat, maka dari itu tidak bisa dilepaskan antara Lembaga Legislatif dan DPW PA kabupaten Aceh Barat. Integritas dan kredibilitas sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat sangat berpengaruh serta memiliki

hubungan kepada DPW PA Kabupaten Aceh Barat

DPW-PA Kabupaten Aceh Barat memiliki hubungan langsung dengan Legislatif dikarenakan terdapat perwakilan-perwakilan rakyat dari DPW-PA kabupaten Aceh Barat di DPRK Kabupaten Aceh Barat. Perwakilan rakyat memberikan kontribusi-kontribusi kepada masyarakat dalam berbagai aspek, salah satunya kesejahteraan masyarakat. DPW-PA Kabupaten Aceh barat dan perwakilan-perwakilan dilegislatif saling bersinergi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat di Kabupaten Aceh barat termasuk pengentasan kemiskinan di kabupaten Aceh Barat.

DPW PA Kabupaten Aceh Barat memfasilitasi program pengentasan kemiskinan melalui perwakilan yang duduk di legislatif. Perwakilan ini terus memantau perkembangan program pengentasan kemiskinan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kemudian DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat juga melakukan koordinasi dengan eksekutif, legislative dan organisasi terkait lainnya agar program yang ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana dan sasaran tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dilakukan oleh DPW PA Kabupaten Aceh sebagai respon aspirasi dari masyarakat sehingga DPW PA Kabupaten Aceh Barat melakukan koordinasi antar pengurus untuk mencari

jalan terbaik dan selanjutnya menjalin koordinasi dengan pihak Pemerintah dan legislatif.

Peran DPW PA Kabupaten Aceh Barat memfasilitasi untuk program pengentasan kemiskinan. Jika dilihat dari aspek sumber dana ini dapat dibagi dua yaitu internal dan eksternal. Jika sumber dana dari Internal yaitu dari dana komitmen perbulan anggota DPRK Aceh Barat dan DPRA Dapil Aceh Barat yang terpilih dari Partai Aceh. Selain itu bantuan tetap dari anggota DPRK dan DPRA dari sumber aspirasi atau pokir pertahun. Jika sumber eksternal yaitu berasal dari pemerintah melalui APBK ataupun sebagainya. Dikarenakan kolaborasi antara DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berjalan baik sampai saat ini. Melihat mayoritas pimpinan daerah di Kabupaten Aceh Barat berasal dari DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat maka hal ini sangat membantu dalam menjalankan program dari DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat ataupun program dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang didukung penuh oleh DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat.

Peran DPW PA sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi permasalahan masyarakat, memfasilitasi pendanaan untuk program pengentasan kemiskinan,

memberikan masukan dan inisiasi kepada pemerintah/ Bupati dan DPRK Aceh Barat atas permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat.

Peran sebagai fasilitator merupakan peranan yang sangat optimal dan maksimal dengan melihat berbagai aspek dari DPW PA Kabupaten Aceh Barat dalam memfasilitasi perihal pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Sebagai salah satu organisasi politik fasilitator merupakan salah satu peranan penting terhadap jalannya organisasi meliputi juga program-program yang direncanakan.

### **3. Peran Sebagai Akselerator**

Tercermin dari upayanya untuk membantu mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan program pengentasan kemiskinan dengan melihat skala prioritas diterapkan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat dalam peranan sebagai Akselerator sebagai upaya mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan pelaksanaan program dalam waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal meningkatkan efektifitas dan efisiensi DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat juga menerima masukan dan pemikiran-pemikiran dari anggota oleh DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat. Pemikiran-pemikiran dari pihak terkait dan masyarakat umum juga sangat memberikan

manfaat kepada kemajuan organisasi dan pelaksanaan program dari DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat

Selain itu, dilakukan pengawasan jika program dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat atas opsi atau usulan dari DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dari pengawalan dan pengawasan pelaksanaan program tersebut adalah agar sesuai dengan perencanaan awal dan tepat sasaran sehingga benar-benar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dukungan dari pemerintah sangat memberikan pengaruh baik kepada DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat dalam mempermudah tercapainya tujuan program. Melakukan koordinasi dan kolaborasi kepada pemerintah, *stakeholder* dan pihak terkait lainnya sangat membantu DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan program yang dalam hal ini pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh barat. Hal tersebut membantu oleh DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat dalam peranannya sebagai akselerator dalam, mempercepat tercapainya tujuan program

#### **4. Peran Sebagai *Policy Creator***

Dalam tahapan peranan aktor, *Policy Creator* merupakan salah satu hal yang penting keberjalanan peran organisasi.

Kewenangan dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan ranah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan pihak Legislatif di Kabupaten Aceh Barat. Maka, DPW PA Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu organisasi di kabupaten Aceh Barat tidak memiliki kewenangan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Hasil ini sejalan dengan temuan Arifin & Rasyid (2020) bahwa pengentasan permasalahan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah melalui penetapan kebijakan telah memperlihatkan *political action* yang optimal. Secara keseluruhan SKPD menyertakan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan sebagai tujuan agendanya , dalam hal ini termasuk oleh partai politik.

Namun, DPW PA Kabupaten Aceh Barat memiliki peluang besar dalam memberikan pengaruh dan manfaat kepada masyarakat dilihat dari sebagian besar pimpinan daerah di Kabupaten Aceh Barat berasal dari DPW PA Kabupaten Aceh Barat. Pemberian manfaat langsung kepada masyarakat dari memberikan usulan dan opsi kebijakan yang bisa diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan legislatif kabupaten Aceh barat

#### **5. Peran sebagai *Implementator***

DPW-PA Kabupaten Aceh Barat menunjukkan peranan sebagai implementator yaitu telah terlaksananya

program-program yang telah dirancang dalam permasalahan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh barat. Dalam hal ini program-program yang diimplementasikan terfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh DPW-PA Kabupaten Aceh Barat diantaranya berupa program yang sifatnya langsung yaitu bantuan kepada masyarakat tidak mampu, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sehingga tidak terdapat lagi daerah yang tertinggal, selain itu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program bantuan bibit kelapa sawit, kelapa, karet, padi unggul, nilam, jati, ternak kerbau, sapi, kambing dan benih ikan.

Sebelum mengimplementasikan program, DPW-PA Kabupaten Aceh Barat mempersiapkan teknis program agar tidak terjadinya permasalahan-permasalahan dalam pengimplentasian yang dapat merugikan masyarakat. DPW-PA Kabupaten Aceh Barat melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap program yang sedang dilaksanakan. Selain itu, DPW-PA Kabupaten Aceh Barat juga melakukan pengawasan terhadap program yang telah dilaksanakan agar program tersebut dapat berlanjut walau tanpa pelaksanaan secara langsung oleh DPW-PA

Kabupaten Aceh Barat sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menjalankan peranan sebagai implementator, DPW PA Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program secara langsung kepada masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, hal tersebut tanpa ada pengaruh dari pihak lain seperti Pemerintah dan stakeholder lainnya. Hal tersebut sebagai upaya dari DPW PA melaksanakan program secara mandiri, sebagai upaya agar program yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan DPW PA Kabupaten Aceh Barat

Sebagai implementator peran DPW-PA Kabupaten Aceh Barat memang masih belum terlalu mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Aceh Barat, mengingat angka kemiskinan yang sangat tinggi. DPW-PA Kabupaten Aceh Barat menjalankan perannya sebagai implementator program sebagai upaya dalam membantu masyarakat mengatasi permasalahan, melalui aspirasi dan laporan yang disampaikan secara langsung.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Barat dalam Pengentasan Kemiskinan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat**

## 1. Faktor Pendorong

### Kompetensi

Sampai saat ini Partai Aceh masih mendominasi sebagian besar suara masyarakat di Provinsi Aceh dan kepercayaan masyarakat Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Aceh dan DPW PA Aceh Barat terkhususnya, memiliki suatu peluang besar dalam menjalankan organisasi sesuai cita-cita dari organisasi. Membangun kepercayaan masyarakat merupakan suatu aspek terpenting dalam menjalankan organisasi dan keberhasilan suatu program, jika tidak mendapat kepercayaan dan dukungan dari sebagian besar masyarakat wilayah organisasi maka akan sangat mempersulit keberjalanan organisasi maupun pelaksanaan program.

Sejauh ini DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat menjalin kerjasama dan kolaborasi bersama organisasi politik lainnya. Dukungan langsung dari Partai Politik lain baik Partai Politik Nasional atau Partai Politik Lokal merupakan salah satu aspek pendukung dalam menjalankan program karena pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat yang dalam hal ini penyelesaian permasalahan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

Kompetensi Partai Aceh dan DPW PA Kabupaten Aceh Barat terkhususnya juga dapat dilihat dari adanya penandatanganan MoU Helsinki. Penandatanganan MoU ini membuat Partai Aceh dan DPW PA Kabupaten Aceh Barat terkhususnya memiliki kelebihan dibandingkan organisasi lainnya dikarenakan sesuai yang tertulis pada Visi Partai Aceh yaitu "... menjunjung Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki..." hal tersebut dapat membangun kepercayaan masyarakat Aceh dikarenakan perjanjian MoU Helsinki memiliki suatu makna fundamental bagi rakyat Aceh. Tidak bisa dilepaskan antara MoU Helsinki dengan Partai Aceh karena MoU Helsinki ibarat nyawa Partai Aceh. Hal ini juga yang menjadi faktor pendukung bagi DPW PA Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan di kabupaten Aceh Barat. Hal ini membuat DPW PA Kabupaten Aceh Barat unik dibandingkan organisasi lainnya di Provinsi Aceh yaitu dengan membawa misi-misi perdamaian pada kesepakatan MoU Helsinki. Selain itu, MoU Helsinki menjadi pijakan-pijakan selanjutnya mengenai inti dari perjanjian tersebut untuk kesejahteraan masyarakat, Partai Aceh khususnya DPW PA Kabupaten Aceh Barat membawa misi-misi

tersebut, ketika melakukan pengorganisasian dan pelaksanaan program arahnya ialah kesejahteraan masyarakat.

### **Sosialisasi**

Informasi disampaikan secara langsung kepada masyarakat dengan terjun ke Gampong dan bersosialisasi di tengah perkumpulan masyarakat. Penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat ini bertujuan agar informasi dapat diterima langsung oleh masyarakat termasuk informasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

DPW PA Kabupaten Aceh Barat melakukan penyampaian informasi atau mensosialisasikan pelaksanaan program kepada pihak instansi Pemerintah Kabupaten Aceh barat yang dalam hal ini Kesbangpol dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penyampaian informasi atau mensosialisasikan kepada pihak Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar terjadi kesinambungan dan kesepahaman pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh DPW PA Kabupaten Aceh Barat

## **2. Faktor Penghambat**

### ***Role Conflict***

Dari sumber anggaran yaitu sangat terbatas dalam menjalankan suatu

program, walaupun sesuai fakta DPW PA Kabupaten Aceh Barat mendapatkan pemasukan anggaran dari beberapa sumber, tetapi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan memerlukan sumber dana yang besar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek *Role Conflict* DPW PA Kabupaten Aceh Barat mendapatkan hambatan dari internal anggota organisasi yaitu seperti pada saat dilakukan rapat atau musyawarah organisasi terkait program atau lain sebagainya. Terjadinya perbedaan pandangan dan pemikiran dalam menyikapi suatu pembahasan dalam musyawarah rapat. Hal tersebut menjadi suatu kendala dalam mencapai kesepakatan bersama dalam organisasi terkait program-program yang direncanakan termasuk program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh barat yang menjadi persoalan yang patut diselesaikan.

Selain itu dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan oleh DPW PA Kabupaten Aceh Barat terdapat pihak-pihak yang mempertanyakan tujuan dari pelaksanaan program. DPW PA Kabupaten Aceh Barat merupakan organisasi yang sangat mendominasi di Kabupaten Aceh Barat maka terdapat pihak yang menilai bahwasannya

program yang direncanakan dan dilaksanakan hanya kepada kepentingan DPW PA Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan awal DPW PA Kabupaten Aceh Barat yaitu dalam hal ini kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

### ***Role Distance***

Kesenjangan yang terjadi pada keberjalanan organisasi terfokus pada peranan pengentasan kemiskinan oleh DPW-PA Kabupaten Aceh Barat terdapat beberapa aspek yaitu kesenjangan anggota diakibatkan perbedaan pendapat atau pemikiran dan terjadi kesenjangan perbedaan dalam menjalankan organisasi antar generasi tua dan generasi muda.

Kesenjangan antar anggota yang terjadi akibat perbedaan pandangan merupakan suatu hal yang wajar dalam keberjalanan organisasi ataupun pelaksanaan suatu program yang dalam hal ini pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh barat. Namun hal tersebut akan mengakibatkan suatu program tidak akan berjalan mulus, memiliki hambatan karena perbedaan cara pandang dan sikap dari anggota organisasi. Akan tetapi hal tersebut menjadi suatu tantangan dan pendorong bagi suatu organisasi yang dalam hal ini DPW-PA Kabupaten Aceh Barat untuk

mencari bagaimana cara penyelesaian dari kesenjangan antar anggota hal ini merupakan suatu langkah baik dalam pelaksanaan program kedepannya.

Selain itu, kesenjangan antar generasi tua dan generasi muda menjadi suatu hal yang dilihat dari hambatan DPW-PA Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan organisasi dan melaksanakan suatu program. Aspek yang menjadi fokus ialah perbedaan cara bagaimana generasi tua dan generasi muda melaksanakan suatu program yang dalam hal ini pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Selain itu pemikiran generasi muda akan berbeda dari generasi tua yang mana hal ini juga memberikan suatu pengaruh hambatan dari segi menyikapi suatu permasalahan dan merencanakan suatu program kerja.

Terjadinya kesenjangan ketika golongan tua atau awal berhenti dalam keberjalanan DPW-PA Kabupaten Aceh Barat dikarenakan golongan tua atau awal sudah sangat memahami keadaan organisasi dan permasalahan di Kabupaten Aceh Barat. Partai Aceh dan DPW PA Kabupaten Aceh Barat khususnya membawa misi dan cita-cita saat perjuangan saat konflik dahulu. Misi dan cita-cita ini hanya dipahami dan dihayati oleh generasi awal atau tua,



Kesenjangan antara generasi tua dan muda.

## **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya sebagai berikut :

- a. Proses koordinasi dengan Dinsos, Kesbangpol dan stakeholder lain berjalan cukup baik. Terdapat beberapa opsi dan usulan kebijakan yang dilaksanakan dari DPW-PA Kabupaten Aceh barat kepada Pemerintah Daerah seperti Subsidi listrik dan pembangunan rumah layak huni kepada masyarakat. Selain itu, DPW PA Kabupaten Aceh Barat juga sangat mendukung penuh kebijakan pengentasan dari Pemerintah Daerah.
- b. Upaya pengentasan kemiskinan dari DPW-PA Kabupaten Aceh barat diimplementasikan berupa bantuan langsung kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta pemberdayaan ekonomi melalui melalui program bantuan bibit kelapa sawit, kelapa, karet, padi unggul, nilam, jati, ternak kerbau, sapi, kambing dan benih ikan. Implementasian program tersebut dengan melihat skala prioritas pada aspek permasalahan kemiskinan. Walaupun belum terlalu mampu menurunkan angka kemiskinan

secara signifikan di Kabupaten Aceh Barat, mengingat angka kemiskinan yang sangat tinggi. Tetapi sangat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

- c. DPW PA Kabupaten Aceh Barat memfasilitasi antar masyarakat dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi permasalahan di tengah masyarakat. Perwakilan rakyat di Legislatif memberikan wujud nyata dengan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, hal tersebut sangat membantu dalam perancangan hingga pelaksanaan program kepada masyarakat. Selain itu, pengimplementasian program langsung dari DPW-PA Kabupaten Aceh barat juga menggunakan beberapa aspek anggaran yaitu internal dan eksternal. Walaupun demikian, sumber anggaran masih sangat terbatas dalam menjalankan program.
- d. Kesimpulan lain yang didapat adalah kemampuan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dengan terjun ke Gampong dan bersosialisasi di tengah perkumpulan masyarakat, tujuan agar informasi dapat diterima langsung oleh masyarakat termasuk informasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Selain itu terdapat beberapa faktor penghambat peran yaitu terdapat

pihak yang menilai bahwa program dilaksanakan hanya kepada kepentingan internal, perbedaan pandangan antar anggota dalam musyawarah, serta kesenjangan antar generasi tua dan generasi muda yang mengakibatkan kesalahpahaman atau perbedaan persepsi ketika berkoordinasi dikarenakan terlambat dilakukan pengkaderan organisasi dalam keberjalanan organisasi terhadap golongan muda atau baru.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. DPW PA Kabupaten Aceh Barat memperluas jaringan kolaborasi atau kerjasama dan melibatkan perwakilan rakyat di legislatif yang berasal dari DPW-PA sebagaimana mestinya agar sumber anggaran dalam pelaksanaan program dapat terpenuhi sesuai yang direncanakan, sehingga pengimplementasian program secara langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b. Mempercepat melakukan pengkaderan organisasi pada golongan muda atau baru hal tersebut sebagai upaya memperkecil kesenjangan antar golongan tua/lama dan golongan

muda/baru. Selain itu pula agar golongan muda dapat menyesuaikan diri pada saat nanti harus menggantikan golongan tua pada posisi-posisi tertentu dalam organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022.

DPA PA. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh Tahun 2013.

Ambarwati, Arie (2018). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative.

Ekarishanti, C., & Kismartini. (2019). *Voluntary Instrument Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Bantargebang*. [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)

Maran, Raga Rafael, (2002). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta. Erlangga

Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi. (2014). *Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk*.

- Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari, 5(1), 12–22.  
<https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/147>
- Oka Mahendra Soekady. (2004). *Prospek Partai Politik Pasca 2004*. Yayasan Pancur Siwah.
- Rahmah, A. (2016). Analisis Kemiskinan di DKI Jakarta. *Ekonomi, Sosial, Dan Pembangunan*, 1, 1–16.
- Sarwono, S.W. (2002). *“Teori-teori Psikologi Sosial.”* PT Raja Grafindo Persada.
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). (1997). *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (2022),  
<https://acehbaratkab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3> (Diakses 3 Mei 2022)